

ANALISIS AKSES KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI WILAYAH PERBATASAN RI-PNG

Moses Yomungga^{1*}, Yusak Leonard Kbare²

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Ottow Geissler, Jayapura, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Universitas Ottow Geissler, Jayapura, Indonesia

*e-mail: moses_yomungga@yahoo.com

Received :
5 Februari, 2018

Revised :
15 Februari 2018

Accepted :
18 Maret 2018

Available online :
10 April 2018



ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui kontribusi LKM dan UMKM terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun perkembangan LKM dan UMKM di Wilayah Perbatasan RI- PNG, secara umum maupun secara khusus bagi masyarakat asli Papua. Dari kajian ini dirumuskan model pengembangan UMKM di wialayah perbatasan antar negara, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan semua pelaku usaha di wialayah perbatasan. Adapun masalah umum yang dihadapi di kawasan perbatasan, antara lain adalah: (1) Belum adanya lembaga keuangan yang berada di wilayah perbatasan antara RI P-PNG hal ini mempegaruhi tingkat akses permodalan dan perkembangan UMKM; (2) Sebagian besar UMKM Asli Papua tidak memanfaatkan peluang Pasar Perbatasan secara baik. Dari hasil kajian potensi usaha di wialyah perbatasan sangat menjanjikan, baik potensi perdangan, potensi pariwisata dan adanya peluang pengembangan usaha-usaha baru. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Papua melalui perumusan, implementasi, dan pengembangan konsep keuangan mikro yang bernuansa (spesifik) Papua, efisien dan efektif diwilayah ini. Berdasarkan hasil kaji, maka perlu adanya LKM yang dapat beroperasi di Wilayah Perbatasan, perlu adanya regulasi khusus bagi wilayah perbatasan dan UMKM asli Papua perlu pendampingan dalam hal pengembangan usaha agar mampu bersaing diwilayah Perbatasan.

Keywords: Pengembangan LKM dan UMKM di Perbatasan

ABSTRACT

The purpose of this analysis is to assess the influence of Micro Finance Institutions (MFI) and Mid-Small Micro Businesses (MSMB) on the population's welfare as well as on MFI and MSMB development in the vicinity of Indonesia-Papua New Guinea border area, emphasizing on the native Papuan population.

From this analysis a small-business development model was developed for the border area, in order to help improve local population and entrepreneurs in the area; since the region functions as a center for sustainable economic development.

The common problems faced in the border area are: (1) No finance institutions operating in the border area, which affects access for capital and small-business development; (2) Most native Papuan MSMB entrepreneurs do not utilize the market opportunity in the border area.

Analysis also suggests that business potentials in the border area are promising, in terms of trade, tourism, and startup potentials. This finding is expected to contribute to improving Papuan people welfare, through formulation, implementation, and development of an effective and efficient Papua-centered microfinance concept in the border area.

Based on these findings, there is a requirement for MFIs to operate in Indonesia-PNG border area, a special regulation for native Papuan small-level entrepreneurs, and a

training in business development ensuring competitiveness in the border area

Keywords : Keywords are written in between 4 to 6 syllables in order to make it easier to index.

Keywords : MFI and MSMB development in RI-PNG area.

1. Pendahuluan

Wilayah perbatasan Skow merupakan wilayah terdepan Republik Indonesia yang memiliki posisi strategis. Keberadaan wilayah perbatasan ini ibarat halaman depan di rumah kita yang perlu dijaga dan dirawat agar tetap dalam keadaan baik dan menarik. Upaya untuk menjaga keberadaan perbatasan ini menjadi menarik karena menyangkut begitu banyak aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi.

Dengan posisinya yang unik, umumnya wilayah perbatasan termasuk wilayah terisolasi, minim sarana dan prasarana serta keterbatasan akses. Terlepas dari kondisi diatas, disadari bahwa wilayah perbatasan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dan akhirnya mendorong perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, maka perlu adanya upaya untuk mendukung Perkembangan wilayah perbatasan tersebut.

Wilayah kontinen Republik Indonesia (RI) berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG). Kawasan perbatasan kontinen tersebut berada di Wilayah Kota Jayapura dan Vanimo., yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda.

Tujuan kajian guna mengetahui tingkat berkontribusi UMKM dan LKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua di wilayah perbatasan selain itu guna mengetahui perkembangan UMKM di wilayah perbatasan Skow-Wutung. Tinjauan pustaka yang tentang Lembaga Keuangan Mikro dan tentang Usaha Miro Kecil dan Menengah.

2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

2.1 Perkembangan UMKM di Wilayah Perbatasan

Pengembangan Usaha mikro dan kecil adalah semua aktifitas yang ditujukan bagi peningkatan dan perluasan secara kuantitatif serta kualitatif dunia wirausaha. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1, “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Pengembangan usaha mikro dan kecil menghasilkan jumlah unit-unit usaha bertambah banyak pada satu sisi, dan kesehatan serta skala usahanya bertambah baik/besar pada sisi lain.

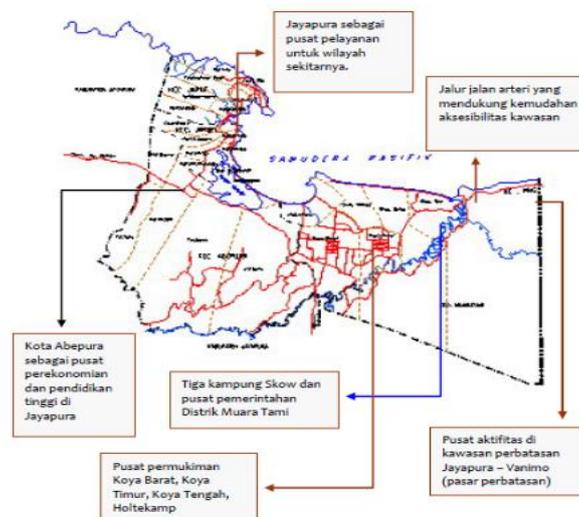
Jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh para UMKM di wilayah perbatasan, sangat terbatas namun usaha-usaha tersebut sangat menjanjikan di antaranya :

1. Jenis Usaha Perdagangan
2. Jenis Usaha Jasa transportasi
3. Usaha Kuliner.
4. Wisata

2.2 Perdagangan

Letak geografis Kota Jayapura dan Vanimo yang berbatasan darat memberikan keuntungan hadirnya hubungan perekonomian RI - PNG melalui kedua kota. Di kawasan perbatasan terdapat dua pasar perbatasan, yaitu **Lhoncini** dan **Marketing Point**. Keberadaan kedua pasar perbatasan ini secara geografis dan ekonomi mempunyai nilai letak (posisi) yang sangat strategis. Letak pasar perbatasan yang berada di pesisir utara.

Kota Jayapura, mempunyai beberapa keuntungan lokasi yang memungkinkan terbentuknya proses interaksi yang tinggi karena adanya faktor *demand-supply*, permintaan (*demand*) dari warga PNG akan berbagai kebutuhan hidup yang murah, variasi pilihan dan jumlah yang banyak serta pemenuhan kebutuhan lain yang mudah diperoleh di Kota Jayapura, dan ditunjang oleh kemampuan Kota Jayapura untuk menjalankan fungsi *supply* (penawaran) barang dan jasa bagi wilayah sekitarnya (sebagai simpul). Adanya faktor *demand* dari PNG telah menjadi pasar bagi produk-produk Indonesia. Untuk memudahkan memahami pola aliran distribusi dalam mekanisme interaksi yang bersifat hierarkis aliran barang dari produsen dari Jawa/ Sulawesi hingga dijual di pasar perbatasan, dan dibeli oleh warga PNG untuk konsumsi maupun bisnis, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1: Pola aliran distribusi

2.3 Kuliner dan wisata

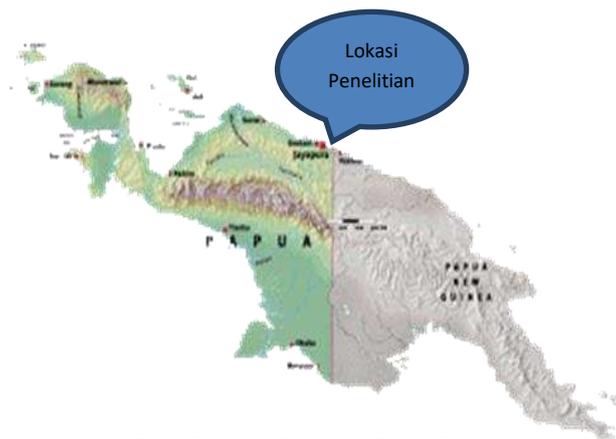
Daerah Perbatasan Skow -Wutung memiliki panorama alam yang sangat indah, selain itu tersedia juga makanan jajanan yang ditawarkan warna negara Indonesia maupun warga PNG di daerah perbatasan masing-masing negara. Makanan jajanan yang ditawarkan antara lain : Daging Domba yang sudah digoreng. Sosis daging Sapi ukuran jumbo, pisang goreng ala PNG. Dengan adanya potensi kuliner dan wisata Alamam di wilayah Perbatasan ini cukup menjajikan.

Namun sampai saat ini potensi tersebut belum dapat dikelola secara baik, diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah pusat agar potensi wisata ini segera digarap. Hal ini terlihat dari sejak Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura, Papua yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pada Selasa 9 Mei 2017 yang lalu. Maka bertambahnya jumlah pengunjung baik dari warga

Negara Indonesia maupun warga negara PNG ke wilayah ini semakin meningkat, berikut ini ditampilkan gambar beberapa obyek wisata.

3. Metode

Ruang lingkup kajian meliputi Penilaian kelayakan akses terhadap dukungan finansial (*feasibility assessment of access to finance support*); Penilaian dan Perkembangan Jenis usaha/inkubasi bisnis. Kajian dan penelitian dilakukan di wilayah Perbatasan RI (Skow –Kota Jayapura)- PNG (Wutung- Vanimo). Pelaksanaan kajian dilakukan selama 8 bulan dari Bulan Mei- Desember 2017 Pendekatan yang digunakan dalam kajian/penelitian ini adalah pendekatan partisipatif dan eksploratif. Dengan tahapan penetapan responden, pengumpulan data, entri dan prosesing data, analisis data dan penyusunan rekomendasi.



Gambar 2 : Lokasi Penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perkembangan lembaga keuangan di Wilayah perbatasan

Akses Keuangan adalah aktifitas masyarakat dalam hal menggunakan fasilitas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan.

Aktifitas masyarakat yang terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan antara lain adalah simpanan (tabungan) atau pinjaman (kredit). Anggota masyarakat yang menabung dananya di lembaga-lembaga tersebut lasimnya disebut nasabah. Lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan menampung/menyimpan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada warga masyarakat dalam bentuk kredit (pinjaman). Oleh karena itu lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan sering disebut lembaga mediasi keuangan. Baik penabung, lembaga-lembaga keuangan, dan peminjam bersama-sama menikmati manfaat-manfaat (benefits) dari jejaring ini.

4.2 Keberadaan Lembaga Keuangan

Sampai saat dilakukan kajian belum ada lembaga Keuangan formal yang dapat membukan kantor di wilayah perbatasan RI- PNG yang ada hanya Petuas Bank BRI dari kantor unit pada Koya yang dapat melayani masyarakat/ UMKM dengan menawarkan Kredit dan Simpanan dan belum melakukan fungsinya sebagai lembaga keuangan informal, selain itu ada beberapa orang secara pribadi menawarkan pinajaman kepada UMKM dengan tingkat bungah yang cukup tinggi.

Hal ini disebabkan belum tersedianya sarana penunjang untuk kegiatan transaksi di wilayah ini, selain itu wilayah ini masih dianggap sebagai daerah yang rawan terhadap tingkat keamanan.

4.3 Akses Modal Usaha Di Pasar Perbatasan

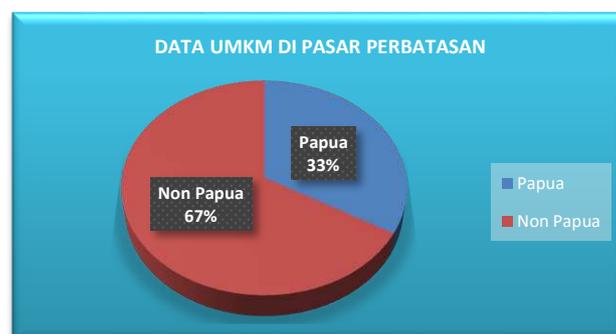
Walaupun belum adanya kantor layanan LKM secara formal di wilayah Perbatasan namun dari segi akses permodalan, para pedagang/UMKM tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal, sumber permodalan yang paling mudah diakses oleh UMKM adalah melalui fasilitas pemodalannya yang ditawarkan oleh Bank BRI. Dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan, Bank BRI menawarkan fasilitas pembiayaan melalui Skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa jaminan. Sebagian besar UMKM di wilayah Perbatasan menggunakan fasilitas ini untuk meningkatkan modal usahanya. Selain itu ada beberapa UMKM yang dapat mengakses Modal Pembiayaan usaha dari Bank BRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan. Selain itu ada para pedagang juga menggunakan modal pribadi atau bantuan finansial dari kerabat/keluarga.

4.4 Nilai Tukar Dan Mata Uang Yang Disepakati

Mata uang yang dipergunakan dalam melakukan transaksi perdagangan di pasar perbatasan Skow-Wutung adalah mata uang Rupiah dari Indonesia dan Kina dari PNG. Jumlah mata uang yang banyak digunakan oleh UMKM di Wilayah perbatasan adalah mata uang Kina, hal ini terjadi karena 99% pembeli yang berbelanja di pasar perbatasan adalah warga negara PNG. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap kina di wilayah perbatasan yang disepakati oleh para pembeli dan penjual sebesar Rp.4.000/ satu Kina. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada tempat pelayanan penukaran uang (*money changer*) secara resmi di wilayah perbatasan Skow –Wutung. Nilai tukar Kina-Rupiah harganya lebih tinggi dari kurs Bank Indonesia, yakni sebesar Rp.25,- lebih tinggi dari nilai tukar sesungguhnya. Sebagian besar UMKM di wilayah Skow-Wutung tetap saja menggunakan mata uang asing dalam melakukan transaksi dan menerima jasa penukaran uang walaupun sudah ada larangan dari Bank Indonesia dan Pemerintah Propinsi Papua.

4.5 Pelaku Usaha Di Perbatasan

Di perbatasan RI (Jayapura) dan PNG (Vanimo) terdapat dua pasar perbatasan, yaitu: Marketing Point dan Lhoncini, yang ditempati oleh 300 orang pedagang secara rinci dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Gambar 3. data UMKM di Pasar Perbatasan
Sumber: data diolah 2017

4.5 Jenis Baarang Dagangan oleh Warga Indonesia

Jenis Barang yang diperdagangkan pada kedua pasar tersebut adalah :

1. Berbagai jenis pakaian,
2. Alat alat elektronik,
3. Bahan bangunan,
4. Peralatan pertanian dan perikanan,
5. Makanan, jajanan dll.

Jenis barang yang banyak diminati oleh warga PNG adalah bahan makanan (sembako), pakaian jadi, dan poduk elektronik. Produk-produk tersebut harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga produk tersebut yang dijual di PNG. Secara umum keberadaan Pasar Marketing Point dan Pasar Lhoncin mempunyai peranan yang sangat penting bagi warga PNG di sekitar perbatasan Jayapura-Vanimo, berikut tampak sampel gambar produk yang dijual.

4.6 Jenis barang Dagangan Warga PNG

Selain produk-produk yang ditawarkan warga negara indonesia, ada juga produk-produk yang ditawarkan oleh warga negara PNG di wilayah perbatasan. Produk-produk yang ditawarkan warga PNG kepada pemebli Indonesia antara lain :

1. Vanili.
2. Kayu Gaharu,
3. Kakao
4. Pinang
5. Makanan dan Minuman Kaleng
6. Pakaian khas PNG
7. Sovenir kas PNG

Dari produk-produk tersebut yang paling banyak diminta warga indonesia dan memeiliki nilai jual yang tinggi adalah Vanili dengan harga jual perkilo 5.000.000. selain itu yang paling diminati adalah buah Pinang, buah pinang tersebut dijual dengan harga Rp.500.000.-per karung.

4.7 Pembeli

Pembeli yang berkunjung ke Pasar Perbatasan setiap harinya mencapai kurang lebih 700 orang pembeli dengan komposisi 99% adalah warga PNG dan 1% adalah warga Indonesia yang berkunjung dari Jayapura ke perbatasan Skow-Wutung. Transaksi yang dilakukan oleh warga PNG, sekitar 80% untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, sedangkan sekitar 20% untuk dijual kembali di beberapa kota di PNG seperti Vanimo, Madang, Ley, Wawak, bahkan Port Moresb.

4.8 Omset Penjualan

Nilai Transaksi perdangan yang dilakukan oleh para pedangan di pasar perbatasan dari triwulan I sampai dengan minggu pertama triwulan IV tahun 2017, tercatat nilai omset penjualan sebesar Rp. 1.584.000.000.000. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Omset Penjualan Nilai Omset Penjualan di Pasar Perbatasan 2017

No	Ket	Perorang	Pedangan	Total Nilai Transaksi
1	Rerata Perminggu	Rp 11.000.000	300 orang	Rp 3.300.000.000
2	Rerata Perbulan	Rp 44.000.000	300 orang	Rp 13.200.000.000
3	Rerata Pertahun	Rp 5.280.000.000	300 orang	Rp 1.584.000.000.000

Sumber : Data Diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Rara-rata omset penjualan perminggu sebesar Rp.11.000.000 juta per orang, sehingga nilai total omset penjualan bagi 300 pedangan sebesar Rp.3.300.000000. sedangkan Rata-rata omset perbulan sebesar 44.000.000 per orang dan rata-rata omset pertahun sebesar Rp. 5.280.000.000 per orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedangan diketahui tingkat keuntungan yang diperoleh sebesar 50% dari harga jual produk. Tingkat keuntungan tersebut diperoleh dari selisi harga pokok produk dan biaya operasional dengan harga jual produk. Selain itu tingkat keuntungan juga diperoleh dari selisi lebih dari nilai tukar mataungan Rupiah terhadap Kina.(1 Kina= Rp.4.000.). perkembangan tingkat keuntungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat Keuntungan Nilai Keuntungan Pedagang di Wilayah Perbatasan

No	Keterangan	Nilai Keuntungan /orang	Jumlah Pedangan	Total Nilai Transaksi
1	Rerata Perminggu	Rp 5.500.000	300 orang	Rp 1.650.000.000
2	Rerata Perbulan	Rp 22.000.000	300 orang	Rp 6.600.000.000
3	Rerata Pertahun	Rp 264.000.000	300 orang	Rp 79.200.000.000

Sumber : data Diolah 2017

Berdasarkan hasil kajian diketahui rata-rata tingkat keuntung bersih perminggu sebesar Rp.5.500.000 per orang, demikian juga rata-rata tingkat keuntungan perbulan sebesar Rp.22.000.000,-dan tingkat keuntungan pertahun sebesar Rp.264.000.000, sehingga dapat diketahui rata-rata keuntung di pasar perbatasan pada tahun 2017 sebesar Rp.79.200.000.000,- .

4.8 Sarana Trasportasi di Pasar Perbatasan

Sarana transportasi yang digunakan UMKM di wilayah pasar lintas batas guna menunjang ativitas perdagangan oleh UMKM maupun konsumen adalah mobil *pick up* , Ojek Perbatasan dan gerobak. Sedangkan truk tidak diperbolehkan. Sektor lain yang pada saat ini ikut bertumbuh adalah jasa ojek dan usaha bengkel. Kedua usaha ini juga digerakan oleh warga pendatang dari wilayah kelurahan/kampung di Distrik Muara Tami. Rata-rata, penyedia jasa ojek yang terdiri dari 10 orang ini mendapatkan omset per per hari pasar sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan usaha bengkel adalah satu-satunya usaha bengkel di tapal batas Indonesia, usaha ini mampu memperoleh omset sebesar Rp. 3.000.000,- per hari pasar dengan mempekerjakan 2 orang tenaga kerja yang adalah anggota keluarganya sendiri. Kurangnya alat transportasi di wilayah perbatasan memberikan angin segar bagi penyedia jasa ojek sehingga mereka mampu untuk mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi perhari pasar juga jasa bengkelSektor lain yang pada saat ini ikut bertumbuh adalah jasa ojek dan usaha bengkel. Kedua usaha ini

juga digerakan oleh warga pendatang dari wilayah kelurahan/kampung di Distrik Muara Tami. Rata-rata, penyedia jasa ojek yang terdiri dari 10 orang ini mendapatkan omset per per hari pasar sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan usaha bengkel adalah satu-satunya usaha bengkel di tapal batas Indonesia, usaha ini mampu memperoleh omset sebesar Rp. 3.000.000,- per hari pasar dengan mempekerjakan 2 orang tenaga kerja yang adalah anggota keluarganya sendiri. Kurangnya alat transportasi di wilayah perbatasan memberikan angin segar bagi penyedia jasa ojek sehingga mereka mampu untuk mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi perhari pasar juga jasa bengkel.

5. Simpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perdagangan di perbatasan kedua negara banyak didorong oleh masuknya para pelaku ekonomi untuk berdagang di perbatasan.
2. Interaksi perdagangan di perbatasan Skow – Wutung timbul karena adanya mekanisme demand supply antar kedua wilayah, dimana sisi demand berasal dari PNG dan Kota Jayapura melalui pasar perbatasan berperan sebagai supplier berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Faktor-faktor pendorong pengembangan kawasan perbatasan Jayapura – Vanimo adalah faktor prospek usaha, kemudahan perijinan usaha, penunjang kesiapan kawasan dan kesiapan pengelolaan kawasan perbatasan.
4. Potensi perdagangan lintas batas RI-PNG sangat menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di perbatasan, namun penduduk di perbatasan belum terserap ke dalam aktivitas perdagangan tersebut karena keterbatasan modal dan juga jaringan distribusi barang dari distributor. Sehingga manfaat ini hanya dapat di raih oleh para pedagang pendatang yang awalnya beroperasi di pusat Kota Jayapura dimana mereka secara pengalaman dan modal sudah lebih mapan.
5. Barang yang diperdagangkan di pasar perbatasan adalah barang hasil industri yang pada saat ini hanya mampu diproduksi di pulau Jawa dan barang-barang ini sesuai dengan permintaan masyarakat PNG. Sedangkan hasil bumi (barang mentah) dari distrik muara tami sendiri tidak laku dijual di pasar perbatasan, permintaannya cenderung dari masyarakat di kota Jayapura.
6. Pemerintah perlu untuk menyediakan bantuan modal dan jalur pemasaran produksi lokal, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kualitas SDM penduduk perbatasan serta pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat asli Papua dalam perdagangan dan agribisnis. Hal ini membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan untuk mengontrol kemajuan dari program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan potensi wilayah perbatasan di Distrik Muara Tami.
7. Perlu menghidupkan sektor jasa angkutan umum bagi penduduk perbatasan, sebab pada saat ini orientasi penjualan hasil bumi maupun aktivitas lainnya masih cenderung berkiblat ke Kota Jayapura, sehingga hasil bumi yang di produksi dapat diangkut dengan mudah dan biaya transportasinya jauh lebih murah.

Dari penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, meliputi:

1. Kawasan perbatasan perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, meliputi fasilitas perdagangan dan jasa, *money changer*, permukiman, pendidikan,

kesehatan, listrik, air bersih, persampahan, pelayanan angkutan umum, terminal, dan mekanisme pengelolaan kawasan ditingkatkan.

2. Pemerintah daerah harus menjamin kelancaran supply barang dan jasa dari Kota Jayapura ke pasar perbatasan, meningkatkan variasi barang yang dijual (untuk memperbanyak pilihan bagi pembeli), menjamin kualitas, menjamin tingkat harga sehingga tetap menarik bagi warga PNG untuk datang berbelanja.
3. Selain penelitian ini, beberapa hal yang perlu dilakukan studi lanjut terkait upaya-upaya pengembangan kawasan perbatasan, antara lain yaitu: penyusunan strategi pengembangan perbatasan Jayapura-Vanimo, kajian mekanisme pengelolaan perbatasan Jayapura-Vanimo, dan berbagai kajian terkait lainnya seperti aspek ekonomi, sosial budaya, politik, pertanahan, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Papua. 2015. *Papua dalam Angka*.
- Badan Perbatasan Provinsi Papua. 2016. *Makalah*.
- Darwin (Penyunting), *Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*, Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI, Jakarta, 2003.
- Marquerite S. Robinson, 1993, *Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970 – 1990*, dalam *Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan*, Sugianto (Ed.), Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001
- Pemerintah Provinsi Papua. 1993. *Pengaturan Khusus bagi Kegiatan Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea*. Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua.
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas.
- Setyo Budiantoro, 2003, *RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat*, *Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II*, Nomor 8, Nopember 2003, Jogjakarta.
- Siyu Gama Timesala (2015). *Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal* JESP Vol. 7(2).
- Yohanes Reinhold R, Ragil Haryanto, Samsul Ma'rif (2008), *Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia –Vanimo, Png*, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 4, Nopember 2008. Mendeley